

Implementasi Pengelolaan Sistem Keuangan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Novia Milenia Putri Tamasya¹ Evi Priyanti² Kariena Febriantini³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2,3}

Email: noviamilenia1411@gmail.com¹

Abstrak

Implementasi dari aktivitas pengelola dana desa mengindikasikan manajemen yang akuntabel dan transparan. Dana desa adalah bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Penelitian ini dalam pemecahan permasalahan akan menggunakan pendekatan perspektif interpretif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian diperoleh dari aparatur desa yaitu kepala desa serta penduduk desa cikalong. Tujuan dari penelitian ini sendiri melihat bagaimana implementasi pengelolaan keuangan dana desa Cikalong. Apakah dalam penerapan peraturan ini terdapat hambatan dalam proses pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh aparatur desa setempat, serta apakah proses pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi aparatur desa berjalan dengan baik dan efektif. Yang memfokuskan pada implementasi teori Grindle yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya, bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi yang berkaitan, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan terkait juga dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Keuangan Desa, Dana Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa Cikalong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yang mana sebagian wilayahnya merupakan daerah pertanian dan pemukiman dengan luas wilayah 318,518 ha/m². Potensi sumber daya Manusia pada desa Cikalong dengan total jumlah 4445 jiwa terdiri dari jumlah lakilaki 2176 jiwa, jumlah perempuan 2269 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1786 jiwa. Dana desa adalah bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana desa perkembangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa dengan nominal paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten oleh atau kota. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Implementasi dari aktivitas pengelola dana desa mengindikasikan manajemen yang akuntabel dan transparan (Anthopoulou, Kaberis, & Petrou,

2017; Setiawan 2011; Walker, 2014). Meskipun demikian, kebijakan akuntansi keuangan, proses penyusunan anggaran, dan analisis keuangan desa berdasarkan temuan menunjukkan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi di desa.

Adapun penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh secara nyata terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Dikarenakan, pembangunan yang lebih baik dan maju diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Selain itu, mengenai kualitas SDM diketahui menjadi penghambat pembangunan desa. Proses pembangunan pada Desa Cikalong telah berjalan sesuai dengan peraturan, tetapi dalam tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut, penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan oleh keterlambatannya penyusunan petunjuk teknis serta rendahnya kualitas sumber daya Manusia. Lebih lanjut Chen & Song (2014) mengemukakan cukup banyak temuan yang menandakan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa.

Permasalahan pengelolaan dana desa seharusnya bisa diminimalisasi dengan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah. Karena jika terdapat sosialisasi maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana desa. penyelewengan dana desa sangat riskan terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang menimpa beberapa aparatur desa. Proses penyalahgunaan ini disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dana desa atau aparatur desa belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa. Penelitian ini dalam pemecahan permasalahan akan menggunakan pendekatan perspektif interpretif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian diperoleh dari aparatur desa yaitu kepala desa serta penduduk desa cikalong. Tujuan dari penelitian ini sendiri melihat bagaimana implementasi pengelolaan keuangan dana desa Cikalong. Apakah dalam penerapan peraturan ini terdapat hambatan dalam proses pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh aparatur desa setempat, serta apakah proses pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi aparatur desa berjalan dengan baik dan efektif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9).

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk Untuk menganalisis secara mendalam terhadap implementasi pengelolaan sistem keuangan dana desa dalam pemerintahan desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Sumber data yang digunakan dalam mendukung penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh melalui teknik pengumpulan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pengelolaan sistem keuangan dana desa dalam pemerintahan desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Sutrisno Hadi

(dalam Sugiyono, 2014:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi yang dilakukan berkaitan dengan implementasi pengelolaan sistem keuangan dana desa dalam pemerintahan desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Teknik Pengumpulan Data menggunakan 3 metode, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat yang sesuai dengan informasi yang kredibel tentang implementasi pengelolaan sistem keuangan dana desa dalam pemerintahan desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dimana jenis penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2013:245) analisa data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah di lapangan.

Analisa data dalam penelitian ini adalah proses menyusun data, yaitu mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan yang dilakukan melalui 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus. Penelitian ini dilakukan di desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Peneliti mencoba untuk mencari tahu secara mendalam mengenai dengan implementasi pengelolaan sistem keuangan dana desa. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 1 bulan, terhitung dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Tepatnya kami melakukan penelitian mengenai implementasi sistem keuangan desa di Desa Cikalong. Berikut penulis uraikan secara lanjut mengenai Hasil Penelitian kami. Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan penjelasan mengenai data selama penelitian dilapangan terhadap implementasi sistem keuangan desa Di Desa Cikalong yang di peroleh data dan informasi melalui wawancara yang bersumber pada konsep manajemen pemerintahan terhadap informan yang ditemui di lapangan yang ada di kantor Desa Cikalong, Kabupaten Karawang. Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan intepretasi penelitian dari hasil analisis data-data dan informasi yang kami peroleh saat melakukan Penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa, sekretaris, dan masyarakat desa Cikalong. Yang memfokuskan pada implementasi teori Grindle yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya, bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi yang berkaitan, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan terkait juga dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Desa Cikalong Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa

Pengimplementasian kebijakan sistem keuangan desa merupakan salah satu penerapan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara yang disalurkan melalui dana desa dan alokasi dana desa, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa

diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang di terima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh Karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPKB selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam dictum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan Akuntabilitas keuangan negara, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Dengan aplikasi keuang desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa implementasi penerapan SISKEUDES di Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya wetan kabupaten Karawang belum optimal.

Permasalahan Konflik Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Cikalong Dalam Menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun sama dengan aplikasi sistem keuangan desa ini. Pihak pemerintah Desa Cikalong merasa terbantu dan merasa puas dengan adanya aplikasi ini. Setiap akhir tahun bisa melakukan pelaporan realisasi dengan cermat dan tepat. Pelaporan ke pihak pusat juga lebih mudah. Bebarapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Sumber Daya Manusia (SDM) di sini adalah operator sistem keuangan desa yang berkaitan langsung dengan pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa. Kendala yang dihadapi operator dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa adalah jika aplikasi ini mengalami perubahan versi, maka operator segera belajar agar mampu menguasai aplikasi ini sehingga operator bisa dengan cepat menyesuaikan dan memahami kembali perubahan tersebut. Selain itu operator juga sigap dan teliti jika ada perubahan anggaran belanja yang muncul secara mendadak, misalnya anggaran untuk penanganan musibah. Setiap perubahan anggaran dikerjakan secara cermat dan hati-hati, karena perubahan ini akan berdampak ke rencana anggaran biaya yang lain.
2. Sarana dan Prasarana: Untuk menunjang pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa, Pihak pemerintah Desa Cikalong melengkapi aplikasi ini dengan satu buah unit Laptop dengan spesifikasi yang bagus, satu buah unit printer dan jaringan internet (WIFI). Kendalanya jika salah satu peralatan ada yang rusak dan harus dibawa ke servis, operator harus menunggu sampai peralatan tersebut selesai diperbaiki. Dan jika jaringan internet trobel maka operator juga harus menunggu sampai jaringan internet selesai diperbaiki. Kalau servis memakan waktu yang lama operator harus berusaha mencari alternatif lain. Bisa memakai laptop pribadi atau mencari pinjaman laptop. Untuk jaringan internet bisa disiasati dengan menyambungkan Jaringan internet laptop menggunakan paket data internet yang ada di handphone (HP).
3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Beberapa kendala yang berkaitan langsung dengan aplikasi sistem keuangan desa, yaitu: 1) Adanya perubahan versi dari aplikasi sistem keuangan desa setiap setahun sekali sehingga perlu pengenalan dan pelatihan ulang, serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut; 2) Penggunaan dana yang bisa dilihat prosentasenya hanya yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang lain seperti Pendapatan

Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi (BHP) dan Bantuan Keuangan tidak bisa; 3) Jika sudah lewat batas akhir pelaporan, operator sudah tidak bisa lagi mengentri data laporan karena sudah dikunci oleh server pusat, jadi harus tertib waktu; 4) Jika terdapat perubahan anggaran yang dituangkan di dalam Perkades (Peraturan Kepala Desa) kemudian perubahan tersebut dientri, operator tidak bisa lagi melihat anggaran-anggaran sebelumnya. Dan anggaran tersebut tidak bisa langsung dialokasikan ke pos yang lain. Harus menunggu bulan perubahan untuk merubah anggaran tersebut; 5) Jika sudah masuk tahap pelaporan akhir server pusat sering error/down. Dimungkinkan

Keputusan Yang diambil oleh Pemerintah Desa Cikalong Terkait Penyimpangan Dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa

Dalam suatu kebijakan, pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan para stakeholders yaitu setiap keputusan yang akan diambil dalam menjalankan kebijakan sebuah program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dalam keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama. Letak pengambilan keputusan pada kebijakan program aplikasi siskeudes dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang telah ditetapkan berjalan lancar maka tujuan dari kebijakan dapat pula tercapai dengan baik. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan program aplikasi siskeudes di desa Cikalong adalah keputusan pada permasalahan yang terjadi dalam pengeoperasian aplikasi siskeudes.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi siskeudes itu sendiri, masalah pertama yang ditemukan yaitu sering terjadi error pada sistem data base ataupun memerlukan password baru sehingga tidak dapat menjalankan aplikasi siskeudes secara valid. Dari informasi yang peneliti dapatkan juga masih kurang pelatihan terkait penggunaan aplikasi ini. Hal tersebut membuat bendahara desa selaku operator siskeudes sedikit kesulitan. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah masih kurang serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yaitu masih sering terjadi error pada aplikasi siskeudes ini serta minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan aplikasi siskeudes yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program siskeudes. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan adanya peninjauan kembali terkait aplikasi siskeudes serta memperkuat sistemnya agar tidak mudah terserang virus. Dan juga rutin mengadakan pelatihan yang diberikan supaya dapat menunjang kapasitas operator siskeudes itu sendiri.

Keterlambatan Penyusunan Petunjuk Teknis Serta Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna dalam menyukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pelaksanaan aplikasi Keuangan Desa akan berjalan dengan lancar apabila dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi dan berkualitas. Pelaksanaan program keuangan desa seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya yang terus meningkat maka didalam menjalankan kebijakan atau program

harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Cikalong belum mencukupi dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes. Di desa Cikalong bendahara desa bertindak sebagai operator dalam mengoperasikan siskeudes meskipun kemampuannya juga masih minim, hal tersebut terjadi karena hanya bendahara desa yang mengerti mengenai aplikasi ini. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelatihan secara khusus sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan bendahara desa Cikalong dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa dan meminimalisir ketidakkemampuannya dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Karena aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini pada tiap tahunnya semakin susah untuk dipahami apalagi pada tahun ini aplikasi siskeudes sudah menggunakan sistem online yang membutuhkan jaringan sehingga dengan adanya bantuan dari pihak pendamping kecamatan untuk saat ini pengelolaan aplikasi Siskeudes bisa dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan sistem keuangan desa masih belum optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, diantaranya: sumber daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem keuangan desa. Dari informan yang peneliti dapatkan juga masih kurangnya pelatihan terkait penggunaan aplikasi tersebut, sehingga hal tersebut membuat bendahara desa selaku operator sistem keuangan desa sedikit kesulitan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya Manusia di Desa Cikalong belum mencukupi tugas dan fungsinya, terutama dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Selanjutnya pemerintah juga kurang serius dalam memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yaitu masih sering terjadinya error pada aplikasi sistem keuangan desa serta minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan aplikasi sistem keuangan Desa yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program SISKEUDES. Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan adanya peninjauan kembali terkait aplikasi sistem keuangan desa serta memperkuat sistem nya agar tidak mudah terserang virus. Dan juga rutin mengadakan pelatihan yang

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran bagi pemerintah Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sebagai berikut: Pemerintah Desa Cikalong sebaiknya lebih meningkatkan daya guna aplikasi sistem keuangan desa yang telah diterapkan. Meningkatkan sinergitas antar perangkat desa dan laporan keuangan desa bisa diupload di website desa agar dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas lagi, yang mana tujuannya agar masyarakat sendiri dapat lebih percaya terhadap pemerintah Desa. Terkait kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, peneliti memberikan beberapa solusi yaitu: Jika aplikasi sistem keuangan desa telah mengalami perubahan versi, maka pemerintah Desa khususnya operator aplikasi sistem keuangan desa harus mempersiapkan diri dan sigap dalam menghadapinya. Cepat belajar untuk menyesuaikan diri agar benar-benar mampu menguasai dan memahami kembali perubahan tersebut. Agar pelaporan tidak mundur dari jadwal, pemerintah Desa Cikalong harus selalu berusaha tertib dan tepat waktu dalam mengentri data untuk pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhyan, W. (2018, April). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Pp. 19-23.

- Asyifah, M. D. (2021). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1-11.
- Athahara, E. P. (2020). Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karawang Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa . *Jurnal Politikom Indonesiana*, 59-60.
- Boon, J. (tanpa tahun). *Anthropology of Religion*. Diakses 5 Oktober 2003 dari <http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.htm>
- Renita Amelia, I. M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 1-15.
- Rosmah. (2018, November 23). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu No6 Tahun 2014 Suatu Tinjauan Ekonomiislam. Pp. 23-32.
- Sulistyowati, E. (2020, Oktober 21). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa. Pp. 11-14.
- Sulistyowati, N. C. (N.D.). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studikasuk Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.